

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Dalam bab tinjauan pustaka, peneliti melakukan kajian terlebih dahulu dengan menggunakan penelitian yang juga membahas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang serta konsep dan teori yang memiliki kesamaan dengan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa artikel sebagai kajian dari tinjauan literatur yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Literatur pertama yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi utama pada penelitian ini yaitu jurnal yang berjudul "*Discourses about comfort women in Japan, South Korea and International Society*" (Kimura, 2015) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Jepang sulit terlepas dari kasus kekerasan seksual, hal ini dikarenakan sejak ketika perang dunia II ada sebuah istilah yang terkenal yaitu *Comfort women* atau *Jugun lanfu* ketika itu Jepang menggunakan wanita sebagai pemuas nafsu yang dilakukan oleh tentara Jepang yang korban nya bukan hanya dari kalangan wanita Jepang saja namun juga dari negara jajahan Jepang seperti Korea Selatan (Kimura, 2015).

Namun pada jurnal ini tidak membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini. Sehingga pada penelitian ini akan lebih berfokus dalam menjelaskan mengenai isu kekerasan seksual yang terjadi di Jepang saat ini. Kemudian bagaimana masyarakat Jepang selalu acuh akan adanya kasus kekerasan seksual khususnya yang menimpa perempuan yang di akibatkan dari adanya budaya patriarki. serta bagaimana gerakan #MeToo dapat meningkatkan atensi masyarakat terhadap isu pelecehan seksual di Jepang.

Jurnal kedua berjudul "*Matahara Mondai dan hubungannya dengan keinginan wanita muda Jepang untuk bekerja dan memiliki anak*" ditulis oleh Wulandari dan Elsy, dalam jurnal ini membahas mengenai *Matahara*

yang merupakan salah satu dari tiga bentuk diskriminasi dan juga pelecehan yang membebani wanita Jepang dalam dunia kerja. Selain itu adapun Sekuhara (*sexual harassment*) dan juga Pawahara (*power harassment*). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana *Matahara* secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya angka kelahiran di Jepang dikarenakan setiap tahunnya, ribuan wanita Jepang harus memilih antara keinginan bekerja atau memiliki anak, kemudian jurnal ini menyajikan data berdasarkan hasil survei dari badan konfederasi serikat pekerja Jepang pada tahun 2015 satu dari setiap lima wanita di Jepang mengalami *Matahara* (Wulandari & Elsy, n.d.).

Jurnal ini tidak membahas mengenai bagaimana masyarakat lainnya menyikapi kasus *Matahara* di tempat kerja yang sudah mempersempit ruang pilihan hidup perempuan di Jepang. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana respon masyarakat Jepang lainnya terhadap kasus *Matahara* yang terjadi pada perempuan di Jepang yang dikarenakan *Matahara* merupakan salah satu penyebab gerakan #MeToo tidak sepenuhnya di terima oleh masyarakat Jepang.

Jurnal ketiga berjudul "*Pushing the resistance theory in IR beyond 'opposition': The constructive resistance of the #MeToo movement in Japan*" yang ditulis oleh Mona Lilja tahun 2022 dalam literatur ini membahas mengenai bagaimana gerakan #MeToo sebagai bentuk dari perlawanan konstruktif terkait dengan kasus pelecehan seksual di Jepang. Serta dalam menyuarakan isu dengan menguraikan kasus kampanye #MeToo di Jepang oleh aktor #MeToo Jepang yang bernama Shiori Ito berawal ketika Ito menjadi korban pelecehan seksual pada tahun 2015 oleh seorang kepala biro Washington untuk Tokyo broadcasting Yamaguchi, mereka bertemu di sebuah restoran untuk melakukan diskusi mengenai peluang kerja. Dan seketika pelecehan seksual terjadi saat Ito merasa ada yang ganjil dan benar saja Yamaguchi melakukan pemerkosaan yang dilakukan di salah satu hotel di Tokyo (Lilja, 2022a).

Kemudia Ito melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian namun diabaikan ia terus berusaha mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpanya kemudian pada tahun 2017 Ito menyuarakan di publik bahwa ia menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang jurnalis yaitu Yamaguchi sejak saat itulah bermunculan respon masyarakat atas kasus Ito dan Ito merupakan bagian dari gerakan #MeToo di Jepang dan dalam perlawanan konstruktif #MeToo di Jepang menghasilkan gerakan, narasi perlawanan baru terkait dengan kasus pelecehan seksual di Jepang kampanye ini memberikan contoh bagaimana suatu isu dapat bergerak secara transnasional melalui bentuk perlawanan yang menular (Lilja, 2022b).

Jurnal ini tidak membahas bagaimana upaya advokasi yang digunakan Shiori Ito yang merupakan korban pelecehan seksual dan juga sebagai penggerak gerakan #MeToo di Jepang, yang ditinjau berdasarkan advokasi transnasional dalam menyampaikan tuntutan kasusnya kepada khalayak umum. Penelitian ini berfokus pada upaya advokasi dilihat dari pendekatan transnasional yang digunakan oleh gerakan #MeToo dan Shiori Ito sebagai aktor penggerak #MeToo di Jepang yang berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat mengenai isu pelecehan seksual.

Jurnal keempat berjudul "*Sexual harassment: A Social issue in Japan*" ditulis oleh Marikkar tahun 2019 jurnal ini menjelaskan bagaimana Jepang yang meski kini menjadi negara maju pada kenyataannya belum maju dalam persoalan kesetaraan gender (*gender equality*). Budaya serta tradisi Jepang yang sampai saat ini masih mengental dengan budaya patriarki yang ada pada lapisan masyarakat Jepang. Dengan membedakan hak antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Sedangkan pada hakikatnya manusia terlahir sama dan sederajat tidak ada perbedaan yang dilatarbelakangi dengan perbedaan gender. Kasus pelecehan seksual masih menjadi masalah yang besar bagi Jepang meskipun pada tahun 1999 pemerintahan Jepang mengeluarkan UU ketenagakerjaan yang memuat

kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab ketika terjadi adanya tindakan pelecehan seksual di tempat kerja (Marikkar, 2009).

Jurnal ini memberikan informasi mengenai data-data yang penting untuk digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Akan tetapi jurnal ini tidak memberikan informasi lebih mengenai bagaimana tindakan pemerintah Jepang setelah belum sepenuhnya kebijakan yang sudah dibuat belum sepenuhnya berhasil untuk menyitas kasus pelecehan seksual. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada di Jepang dan disaat setelah masuknya gerakan #MeToo di Jepang.

Dalam jurnal kelima berjudul *“Going forward with #MeToo Movement: Toward a safer work environment”* jurnal ini memaparkan bahwa gerakan #MeToo sebagai gerakan yang menular secara global hampir ke seluruh negara penjuru dunia mengetahui gerakan #MeToo termasuk Jepang. Meskipun demikian gerakan ini sudah dikenal akan tetapi penulis mengatakan bahwa gerakan ini memiliki dampak yang kurang baik. Contohnya gerakan ini menggunakan media sosial sebagai “pengadilan” bagi pelaku pelecehan seksual sehingga dapat memberikan kesan memperlakukan pelaku pelecehan seksual namun dampak baiknya, gerakan dapat digunakan oleh korban pelecehan seksual sebagai sarana untuk menyampaikan masalah, pengungkapan rasa takut dan cemas atas apa yang terjadi pada korban pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan masih terdapat korban yang kesulitan membuat laporan pengaduan atas pelecehan seksual yang menimpa korban (Gupta et al., 2019).

Jurnal ini memperkaya argumen pembandingan dikarenakan tidak hanya berfokus pada kelebihan gerakan #MeToo saja. Akan tetapi jurnal ini menunjukkan adanya pandangan terkait dengan kekurangannya sehingga pada penelitian ini data dari jurnal digunakan sebagai pembandingan mengenai penjelasan mengenai dampak gerakan #MeToo terhadap pespektif masyarakat Jepang.

2.1 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Feminisme Radikal

Dalam buku *“Feminist political Theory”* feminisme radikal memahami bahwa kekuasaan negara bukan sebagai isu politik yang utama, sedangkan menurut pandangan feminisme liberal menentukan bahwa negara merupakan lembaga yang netral. Feminisme radikal menjelaskan bahwa adanya tatanan masyarakat baru dengan menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki tanpa adanya pemisahan antara ranah publik dan ranah privat (Bryson, 2016). Feminisme radikal memiliki tujuan dalam menentang patriarki serta untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu kekerasan seksual yang umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan melecehkn secara seksual seperti menyentuh, memanggil, meraba yang tentunya membuat orang lain merasa tidak nyaman serta adapun tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual (Bryson, 2016).

Dikatakan sebagai kekerasan seksual apabila pelaku melakukan tindakan sensual terhadap korban sehingga korban merasa tidak nyaman. Pelecehan terjadi dikarenakan adanya dominasi dari satu gender yang dimana mayoritas korban merupakan perempuan dan pelaku lebih banyak laki-laki meskipun tetap ada kasus dimana perempuan menjadi pelaku dan laki-laki menjadi korban. Maka dari itu Feminisme radikal mengupayakan penghapusan atas adanya perbedaan dominasi gender yang telah dibangun oleh patriarki. Feminisme radikal memiliki pandangan bahwa patriarki menyebabkan adanya penindasan pada kaaum perempuan yang lebih mengedepankan peran laki-laki terhadap perempuan (Bryson, 2016).

Sedangkan patriarki sendiri merupakan kekuasaan sang ayah, dimana kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh ayah sebagai kepala keluarga sistem patriarki memberikan akses sebagai pemimpin dan kepala kepada kaum laki-laki serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perempuan yang menjadi istri serta anaknya. Tanggung jawab dimaksud berupa harta benda milik keluarga yang hanya dikuasai oleh ayah,

pembuatan keputusan oleh ayah, serta hanya ayah yang menguasai anggota keluarga. Patriarki memposisikan laki-laki berada di atas perempuan dan perempuan harus berada dibawah laki-laki sehingga hal inilah yang akhirnya menciptakan adanya stigma terhadap patriarki (Bryson, 2016).

Adapun pengertian feminisme radikal menurut Shulamith Firestone dalam bukunya berjudul "*The dialectic of sex*" (1970), feminisme radikal merupakan upaya penekanan pada adanya transformasi yang mendasar pada struktur sosial dan keluarga untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam bukunya ia mengatakan bahwa dalam usaha untuk mencapai tujuan pembebasan terhadap perempuan, perlu dilakukannya sebuah revolusi sosial untuk menghilangkan struktur masyarakat patriarki dengan konsep dialektika biologi, bahwa peran biologis dalam reproduksi menjadi bagian dari faktor penentuan peran gender. Ia mengatakan bahwa masyarakat harus membebaskan diri dari ketergantungan pada perbedaan biologis dalam menentukan peran dan status gender. Kemudian ada "*elimination of the family*" yang merupakan asumsi yang sangat kontroversial Firestone yaitu menghapus institusi keluarga tradisional dimana Firestone beranggapan bahwa keluarga merupakan penyebab utama ketidaksetaraan (Weeks, 2015).

Gerakan #MeToo di Jepang menuntut kesadaran masyarakat atas adanya kekerasan seksual yang terjadi di Jepang selaras dengan pemikiran radikal. Dengan melakukan perlawanan budaya patriarki yang secara turun-temurun ada dalam masyarakat pada suatu negara, didorong dari adanya gerakan perlawanan kaum perempuan yang ikut serta melakukan perubahan pola pikir dan perilaku pada masyarakat mengenai kesetaraan tanpa melihat adanya perbedaan jenis kelamin.

2.2.2 Feminisme Liberal

Feminisme liberal dipahami sebagai salah satu aliran yang ada pada perspektif feminisme yang berlandaskan kebebasan dan kesetaraan secara penuh. Dalam buku Alison Jaggar yang berjudul *Feminist politics and human nature* (Jaggar, 1983). Mengungkapkan bahwa kaum liberal meyakini

bahwa manusia memiliki sifat yang unik yang merupakan kemampuan rasionalitasnya. Feminisme liberal memiliki pandangan bahwa negara sebagai penguasa yang tidak berpihak pada kepentingan kelompok berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara di dominasi oleh kaum laki-laki sehingga menimbulkan adanya kepentingan yang bersifat “maskulin”. Feminisme liberal meyakini bahwa keberadaan “perempuan” sebatas hanya sebagai warga negara bukan sebagai pembuat kebijakan. Feminisme liberal meyakini bahwa kebebasan merupakan prinsip dalam pergerakannya, dikarenakan dengan adanya kebebasan setiap orang dapat menentukan hidupnya masing-masing. Kemudian feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihilangkan dengan cara merubah perilaku setiap orang. Sebagaimana pergantian perilaku wanita terhadap interaksinya dengan pria dan bagaimana wanita sadar akan hak-hak hidupnya dengan demikian ketika wanita sudah menyadari apa yang menjadi haknya, sehingga terbentuklah sikap warga yang baru dimana terjalinnya ikatan yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi kesetaraan (Jaggar, 1983).

Dalam buku Betty Friedan yang berjudul “*The feminine mystique*” (1963) feminisme liberal yang memiliki fokus utama yaitu pemberian hak-hak perempuan dalam kerangka sosial yang sudah ada. Friedan dalam bukunya menyebutkan “*emphasis on education and work*” dimana feminis liberal menekankan pentingnya pendidikan serta pekerjaan bagi perempuan selain itu Friedan mengadvokasi agar perempuan dapat mengejar pendidikan yang tinggi juga dapat mencari karir dalam mencapai kemandirian finansial dan kepuasan pribadi. Dengan mendorong adanya kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik hal ini mendorong perempuan dalam mencapai kesetaraan gender (Topini, 2013).

Gerakan #MeToo di Jepang mendorong masyarakat yang masih memiliki pemikiran tradisional, untuk dapat memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perannya masing-masing dan dapat menentukan

hidupnya sendiri. Menyadari bagaimana perempuan sadar akan segala hal yang menjadi hak dari hidupnya, diantaranya hak pendidikan, pekerjaan serta perlindungan dari pelecehan sehingga terbentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di lapisan masyarakat.

2.2.3 *Transnational Advocacy Network*

Dengan berkembangnya fenomena transnasional yang dilihat dari benda yang bersifat *tangible* dapat “dirasakan” dan *intangible* “tidak dirasakan” seperti halnya ideologi. Dalam perkembangannya studi Hubungan Internasional (HI) kajiannya tak lagi hanya membahas mengenai hubungan antar negara (*state*) saja akan tetapi telah berkembang dengan jangkauan yang lebih luas karena adanya kemajuan pesat teknologi komunikasi dan informasi serta adanya pergerakan masyarakat yang mulai sadar akan adanya isu internasional. Dalam buku yang berjudul *Activist beyond borders (1998)* oleh Keck & Sikkink mendukung bahwa masyarakat sipil mampu dalam membangun sebuah relasi yang melintasi batas negara yang sama-sama memiliki *common goal* dalam artian kepentingan kelompok atau individu yang termarginalkan secara politik, ekonomi dan sosial. Dimana peran aktor non- negara didefinisikan secara jelas dan tegas (Keck & Sikkink, 1998b).

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan dampak advokasi transnasional merubah kebijakan pada sektor ketenagakerjaan di Jepang maka dari itu penulis menggunakan advokasi transnasional yang dicetuskan oleh Keck & Sikkink dengan menggunakan empat strategi advokasi sebagai alat dalam mencapai kepentingan kelompok gerakan #MeToo di Jepang yang terdiri dari *information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics*.

1. *Information politics* diyakini dengan menggunakan informasi untuk membentuk adanya vibrasi di antara para aktor TAN sehingga dapat menimbulkan adanya reaksi terhadap suatu isu. Dalam penggunaan tagar #MeToo di Jepang menimbulkan

lahirnya gerakan #WeToo yaitu gerakan yang berupa narasi pengulangan kampanye #MeToo di Jepang sebagai respon atas kemunculan gerakan #MeToo di Jepang (Keck & Sikkink, 1998a).

2. *Symbolic politics* upaya politik yang dilakukan dengan menggunakan simbolis sebagai upaya dalam memahami suatu isu yang sedang di advokasi melalui tagar MeToo para aktivis #MeToo di Jepang pun memanfaatkan peringatan hari – hari besar seperti Hari perempuan Internasional ketika melakukan aksi kampanye (Keck & Sikkink, 1998a).
3. *Leverage politics* adalah kemampuan menciptakan tekanan terhadap pihak pemerintah dalam hal ini Shiori Ito aktor #MeToo yang merupakan seorang jurnalis yang memiliki kemampuan, menyuarakan isu melalui penerbitan buku dan film yang menceritakan kebungkaman pemerintah atas isu pelecehan seksual yang terjadi di Jepang yang kemudian menciptakan atensi masyarakat atas isu yang diangkat (Keck & Sikkink, 1998a).
4. *Accountability politics* merupakan upaya politik akuntabilitas dari norma internasional yang sudah ada. Dalam hal ini dengan menuntut bukti nyata terkait adanya norma internasional yang ikut berperan dalam gerakan #MeToo di Jepang. Strategi ini bertujuan dalam melahirkan adanya perubahan kebijakan baru sebagai bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Jepang (Keck & Sikkink, 1998a).

Dalam artikel berjudul “*International norm dynamics and political change*” oleh Finnemore dan Sikkink (1998). TAN merupakan jaringan aktor non-negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu selain itu TAN melibatkan organisasi non-pemerintah, gerakan sosial yang melakukan advokasi dan juga individu yang memiliki kepentingan yang sama. TAN juga melalui tiga tahapan siklus normatif yaitu “*norm emergence*” (kemunculan norma), adapun “*tipping point*” dimana 1/3 populasi masyarakat internasional menyetujui lahirnya sebuah norma baru,

kemudian tahapan selanjutnya “*norm cascade*” (penyebaran norma) dan “*norm internalization*” (internalisasi norma). Finnemore dan Sikkink menyebutkan bahwa TAN dapat meraih keberhasilan dalam menciptakan norma internasional namun bukan berarti semua upaya TAN dapat berhasil (Finnemore & Sikkink, 1998).

Upaya advokasi berdasarkan pendekatan transnasional pada gerakan #MeToo di Jepang memiliki tujuan dalam melindungi hak korban dari tindakan pelecehan seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor ketenagakerjaan. Dimana korban terpaksa harus membongkarkan kasus pelecehan yang dialaminya dikarenakan pelecehan merupakan hal yang kurang mendapatkan atensi lebih dari, masyarakat yang sangat terikat dengan budaya patriarki. Keberhasilan TAN dalam gerakan #MeToo di Jepang mulai terlihat dari adanya dukungan publik dan kekuatan publik dalam menuntut perlindungan bagi korban pelecehan.

2.3 Asumsi penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, memunculkan adanya asumsi bahwa: “Upaya #MeToo, #WeToo, dan Shiori Ito memperlihatkan adanya upaya advokasi transnasional dalam perubahan kebijakan ketenagakerjaan di Jepang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya strategi TAN melalui buku black box sebagai *information politics*, #MeToo sebagai *symbolic politics*, UN Women sebagai *leverage politics* dan CEDAW sebagai *accountability politics*. sehingga menghasilkan perubahan kebijakan melalui amandemen UU No. 24 tahun 2019 tentang kebijakan ketenagakerjaan di Jepang”.

2.4 Kerangka analisis

